



Politik Air Bersih di Desa Sukaringin

Restu Rahmawati¹, Firman Firman²

¹ Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia

² Jurusan Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Jun 26, 2022
Diterima: Jul 14, 2022
Dipublikasi: Jul 31, 2022

Kata Kunci:

Kedungringin; Politik Air;
Pengelolaan Air Bersih:

Koresponden:

Restu Rahmawati

Jurusan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta

Email:

restu.rahmawati@upnvj.ac.id

Sitasi Cantuman:

Rahmawati, R., & Firman, F.
(2022). Politik Air Bersih di
Desa Sukaringin *Journal of
Political Issues*. 4(1); 10-18.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.80>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.80>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This paper will examine the politics of clean water management, an overview of the scarcity of clean water quality in Kedungringin Village, Sukawangi District, Bekasi Regency. The reason this research was conducted was because there was a problem in Kedungringin Village, namely the lack of access to clean water both in quality and quantity. Various efforts have been made by the people of Kampung Kedungringin, such as constructing boreholes with the help of benefactors. However, this is not enough to meet the needs of clean water for all residents. The role of PDAM Tirta Bhasasi in this case has not been able to reach the Kedungringin Village area because the Clean Water Pipeline is far from the location of Kedungringin Village. With these problems, this research will examine how the efforts made by PDAM Tirta Bhasasi and the Sukaringin Village Government in meeting access to clean water needs in Kedungringin Village. The research method used in this research is a descriptive qualitative research method with a case study approach. The results of this study indicate that the efforts made by PDAM Tirta Bhasasi in meeting the need for clean water for the people of Kampung Kedungringin have not been realized. This is because PDAM Tirta Bhasasi is in the construction of a new clean water pipeline to the housing/cluster area in Sukaringin Village. Clean water has not been able to flow to Kedungringin Village because PDAM Tirta Bhasasi prioritizes cluster housing areas in collaboration with developers. This means that groups of people who have money will be prioritized over groups of people who do not have money.

Abstrak Tulisan ini akan mengkaji tentang politik pengelolaan air bersih sebuah tinjauan atas langkanya kualitas air bersih di Kampung Kedungringin Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi. Alasan penelitian ini dilakukan adalah karena terjadi persoalan di Kampung Kedungringin yakni tidak adanya akses terhadap air bersih baik secara kualitas maupun kuantitas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat Kampung Kedungringin seperti membangun sumur bor dengan bantuan dari para dermawan. Namun hal ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh warga. Peran PDAM Tirta Bhasasi pun dalam hal ini belum mampu menjangkau wilayah Kampung Kedungringin karena Saluran Pipa Air Bersih jauh dari lokasi Kampung Kedungringin. Dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana upaya yang dilakukan PDAM Tirta Bhasasi dan Pemerintah Desa Sukaringin dalam memenuhi akses kebutuhan air bersih di Kampung kedungringin. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan PDAM Tirta Bhasasi dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kampung Kedungringin belum terealisasi. Hal ini dikarenakan PDAM Tirta Bhasasi dalam pembangunan saluran pipa air bersih baru sampai ke wilayah perumahan/cluster di Desa Sukaringin. Air bersih belum bisa mengalir ke Kampung Kedungringin karena PDAM Tirta Bhasasi lebih memprioritaskan Kawasan perumahan cluster bekerjasama dengan pengembang. Itu artinya kelompok masyarakat yang mempunyai uang akan lebih diprioritaskan daripada kelompok masyarakat yang tidak mempunyai uang.

Tentang:

Restu Rahmawati menyelesaikan Studi Magister di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Firman Firman menyelesaikan Studi Magister di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

PENDAHULUAN

Air mempunyai peranan yang sangat strategis dan harus tetap tersedia jumlahnya, sehingga dapat mendukung kehidupan manusia dan pelaksanaan pembangunan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi suatu masyarakat tertentu menjadi suatu acuan dalam menentukan apakah masyarakat di suatu lokasi atau desa sudah terpenuhi atau belum. Dalam rantai kehidupan, air merupakan hal yang sangat penting. Kebutuhan akan air tentunya terus meningkat dari waktu ke waktu, hal ini bukan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk melainkan juga digunakan dalam kegiatan industri, pertanian dan perikanan. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa pada tahun 2002, terdapat satu miliar lebih orang yang tidak memiliki akses terhadap air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa krisis air bersih menjadi isu yang serius karena air tidak terdistribusi dengan merata di dunia (Endaryanta, 2007). Dalam rangka melayani kebutuhan air minum, pemerintah mendirikan Badan Peningkatan penyelenggaraan SPAM yang diselenggarakan badan usaha milik daerah (BUMN/BUMD) berupa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyelenggara SPAM (Sihotang, 2018).

PDAM harus memberikan pelayanan yang maksimal baik secara kuantitas dan kualitas bagi masyarakat khususnya pelanggan baik dalam menyediakan air untuk kebutuhan masyarakat maupun memastikan kualitas air juga sesuai dengan baku mutu air. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk menikmati air bersih dan sehat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Kelangkaan air di beberapa daerah merupakan sumber utama ketidakstabilan ekonomi dan politik (Mercer, 2018).

Fenomena adanya gejala krisis air bersih ini bisa menjadi ancaman yang serius terhadap umat manusia khususnya keamanan lingkungan. Berbagai faktor dan aspek yang masuk ke dalam ruang lingkup keamanan dan kebutuhan lingkungan meliputi penurunan dan degradasi lingkungan, berkurangnya sumber daya alam, bencana alam, dan polusi (United Nations Trust Fund for Human Security, 2009). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui hak asasi manusia (HAM) terhadap air dan sanitasi serta peran penting air dan sanitasi untuk mewujudkan hak asasi manusia melalui Resolusi PBB Nomor 64/292 Tahun 2010. Melalui UN Water, PBB juga mempromosikan pentingnya upaya bersama agar tercapai *water security* sebagai keamanan yang bersifat multi dimensi dan multisectoral.

Air disebut sebagai penghubung yang penting antar berbagai aspek keamanan. Ketersediaan air menjadi tantangan yang begitu kompleks dan saling berhubungan pada berbagai level, baik level lokal hingga level internasional untuk mencapai sense of security, ketahanan, pembangunan, dan human *well-being* (United Nations Water 2013). Pentingnya hal tersebut, dibutuhkan suatu kolaborasi aktor-aktor yang bersifat interdisipliner dari berbagai sektor, komunitas dan lembaga politik sehingga kemungkinan terjadinya kompetisi dan konflik antarkonsumen air serta dampak jangka panjang dapat dihindarkan (United Nations Water 2013).

Kondisi memburuknya permasalahan lingkungan telah menjadi sumber masalah air dan berbagai risikonya. Stern (2014) dan McCarl dan Reilly (1999) mengatakan bahwa faktor penyebab krisis air dari kualitas, sisi kuantitas, maupun kontinuitas didalamnya mengenai perubahan iklim global dalam jangka panjang, intensitas, dan pola sebaran spasial, maupun curah hujan yang tidak menentu serta temporal. Permasalahan yang bisa muncul adalah banjir serta kekeringan yang semakin sering terjadi. Keduanya berisiko besar dalam sektor pertanian. Selain itu, persoalan ekologi daerah aliran sungai (DAS) yang terus memburuk memperparah degradasi sumber-sumber air. Begitupun halnya dengan adanya eksploitasi berlebihan tanpa menerapkan upaya keberlanjutan lingkungan mengakibatkan pihak hilir menerima risiko kekurangan pasokan air untuk keperluan kebutuhan hidup dan kegiatan ekonominya. Ini bisa menjadi ancaman yang serius terhadap pelaksanaan kegiatan usaha tani

Berdasarkan peta air Kabupaten dan Kota Bekasi diatas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Sukaringin merupakan wilayah yang termasuk terbatas setempat untuk ketersediaan air yang ditandai dengan warna kuning muda. Hal ini berbeda dengan wilayah lainnya di Bekasi Kota ketersediaan air baik. Penyedia air bersih di Kabupaten Bekasi adalah PDAM Tirta Bhagasasi. Sebagai penyedia jasa air bersih untuk beberapa area industri, seperti area bisnis maupun pemukiman penduduk yang ada di wilayah operasional Tirta Bhagasasi, yang meliputi Kabupaten Bekasi serta sebagian Kota Bekasi. Tirta Bhagasasi dalam hal ini dalam klaimnya senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik berupa jasa penyedia kebutuhan akan air yang terjamin kualitas dan kuantitasnya. Hal ini adalah bagian langkah kecil Tirta Bhagasasi untuk menyehatkan masyarakat Bangsa Indonesia. Semua usaha ini dilakukan oleh Tirta Bhagasasi untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

Langkanya air bersih di Kampung Kedungringin tentunya menjadi pertanyaan besar bagi peneliti karena Kabupaten Bekasi dengan kategori wilayah perkotaan dan mudah akses terhadap berbagai fasilitas publik masih ada wilayah yang kekurangan air bersih. Seharusnya di wilayah perkotaan akses terhadap air bersih akan mudah namun yang terjadi di Kampung Kedungringin justru sebaliknya. Hal ini kemudian yang akan menjadi permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana politik pengelolaan air bersih di Kampung Kedungringin Kabupaten Bekasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dalam bentuk wawancara mendalam (indepth interview), dan observasi untuk mendapatkan data

Gambar 1 Peta Air Di Kabupaten Bekasi

berjumlah 2 orang yakni Ibu Kiki dari Litbang PDAM Tirta Bhagasasi dan Bapak Hasanuddin selaku Ka. KCP Tambelang. Selain itu, informan penelitian lainnya adalah dari warga Kampung Kedungringin yakni Bapak Roni dan Bapak Adit selaku perwakilan dari tokoh pemuda. Berdasarkan sasaran penelitian diatas, maka lokasi penelitian ini di Kantor PDAM Tirta Bhagasasi Jalan Kalimalang BTB 25 Kp.Tegal Danas Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan Kampung Kedung Ringin Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Data penelitian yang diperoleh dari lapangan diolah dengan menggunakan teknik analisis data dengan tahapan reduksi data yakni menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi, tahap berikutnya adalah penyajian data yaitu peneliti menyajikan data yang sudah direduksi atau disederhanakan di tahap sebelumnya, dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini menggunakan uji validitas yang digunakan adalah teknik triangulasi untuk pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek atau membandingkan data yang diperoleh dari sumber atau kriteria lain di luar data, untuk meningkatkan validitas data. Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber, dengan cara membandingkan apa yang dikatakan subjek dengan informan tersebut. Maksudnya agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja subjek penelitian, tetapi data juga diperoleh dari beberapa sumber lain yang dapat membantu dalam memvalidasi data dan temua, triangulasi metode yaitu dengan cara membandingkan data observasi dengan data wawancara dan data perbandingan hasil observasi data dari wawancara dengan isi dokumen yang relevan. Dalam hal ini peneliti berusaha mencari kembali data yang diperoleh melalui wawancara (Moleong, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kampung Kedungringin merupakan salah satu daerah yang sejak 8 tahun yang lalu mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pada musim kemarau masyarakat bisa mengantri sangat panjang apabila ingin memperoleh air bersih. Sumber air bersih yang dimiliki masyarakat Kampung Kedungringin hanya berasal dari sumur bor dengan bantuan satelit dari hasil sumbangan melalui wakaf tanah dan air bersih.

Kualitas air di Kampung Kedungringin Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi berwarna kuning, berbau, dan bahkan hitam sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Menurut informasi dari informan penelitian bahwa masyarakat telah terbiasa menggunakan air dengan kualitas yang buruk tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti mandi, dan lainnya. Apabila mereka menggunakan air tersebut untuk mandi, maka kuku tangan dan kaki akan berubah warna menjadi kuning serta badan mereka akan mengalami gatal-gatal.

Terkadang, karena terdesak kebutuhan sebagian masyarakat terpaksa menyaring air berwarna hitam itu menggunakan alat yang sangat sederhana seperti pasir putih, busa dan baju bekas yang diletakkan di dalam ember yang telah dilubangi dan disambungkan dengan pipa. Proses ini harus dilakukan selama tiga kali untuk memperoleh air hingga jernih. Namun meskipun telah melalui proses penyaringan, air tetap bau. Melihat kondisi demikian, masyarakat Kampung Kedungringin juga telah berusaha untuk menggali sumur yang ada di rumah mereka masing-masing namun menurut mereka menggali sumur lebih dalam juga bukan pilihan lantaran kualitas air tetap buruk. Begitu pula air tanah yang dipompa melalui mesin pemompa. Kedalaman 100 meter pun tak membuahkan air dengan kualitas baik. Kedalaman 120 meter baru air bisa bersih (Bekasi, 2020).

Kondisi langkanya air bersih di Kampung Kedungringin, telah menyentuh hati salah seorang dermawan yang berasal dari luar Kabupaten Bekasi. Dermawan tersebut membuatkan dua buah sumur bor untuk masyarakat Kampung Kedungringin khususnya untuk warga RT 03 RW 05. Dua sumur bor yang ada di RT 03 RW 05 tersebut, masing-masing mempunyai satu penampung air (toren) hasil dari wakaf dermawan. Masing-masing sumur bor mengaliri 40 rumah, sehingga sampai saat ini yang baru memperoleh akses air bersih baru mencapai 80 rumah atau sekitar 251 warga yang memperoleh akses air bersih dari total 884 warga atau baru mencapai 28% dari total seluruh warga Kampung Kedungringin RT 03 RW 05.

Langkanya air bersih di Kampung Kedungringin dikarenakan sulitnya dalam mengakses air bersih karena jauhnya lokasi dari saluran air bersih. Pipa-pipa saluran air bersih selama ini keberadaannya masih jauh dari Desa Sukaringin dan baru tahun 2021, KCP Tambelang mengajukan permintaan penambahan instalasi pipa air untuk wilayah Sukaringin dengan menginduk kepada saluran pipa yang berasal dari KCP Tambelang. PDAM Tirta Bhagasasi melakukan pengembangan instalasi pipa di wilayah Desa Sukaringin dengan sambungan pipa berasal dari KCP Tambelang sehingga apabila nanti Kampung Kedungringin akan memasang instalasi pipa, aksesnya akan menjadi lebih dekat. Dalam perihal kemudahan dalam menjangkau sarana prasarana untuk penyediaan air bersih di Kampung Kedungringin Desa Sukaringin PDAM Tirta Bhagasasi telah berusaha menghadirkan air bersih, meskipun dalam implementasinya belum semua wilayah di Desa Sukaringin mendapatkan akses air bersih termasuk Kampung Kedungringin. Penyebab kelangkaan air bersih di Kedungringin tentu berbeda dengan yang terjadi di Suriah. Kelangkaan air di Suriah merupakan konsekuensi dari partai Bath yang terus-menerus mempromosikan pertanian intensif air. (Barnes, 2009) Dan di Sao Paulo Brazil, negara bagian menerapkan pengurangan tekanan dalam pipa air sebagai lawan dari penjatahan formal. (Millington, 2018Millington)

Komitmen PDAM Tirta Bhagasasi melalui KCP Tambelang untuk menambah saluran pipa air bersih di Desa Sukaringin, ternyata hanya untuk merespon permintaan konsumen dari pengembang perumahan yang berada di Desa Sukaringin. Pengembang perumahan cluster/kompleks mengajukan permintaan air bersih ke PDAM Tirta Bhagasasi karena tersedianya air bersih di perumahan merupakan salah satu strategi marketing mereka untuk memasarkan perumahannya. Para pengembang dalam hal ini menjadikan ketersediaan air bersih dari PDAM sebagai media promosi bagi perumahan yang akan ditawarkan kepada konsumen. Para pengembang mencantumkan informasi terkait ketersediaan air bersih dari PDAM dalam brosur iklan mereka sehingga ini menjadi daya tarik konsumen untuk membeli rumah yang ditawarkan dalam brosur tersebut. Perumahan kluster/kompleks di Kabupaten Bekasi sebagian besar dalam media promosi mereka mencantumkan ketersediaan air bersih dari PDAM sehingga dalam hal ini PDAM Tirta Bhagasasi lebih memprioritaskan ketersediaan air bersih bagi perumahan kluster/kompleks daripada pemukiman area domestik atau bukan perumahan kluster/kompleks. Guna merespon permintaan pengembang tersebut, maka PDAM Tirta Bhagasasi melalui KCP Tambelang menambah saluran pipa air bersih di Desa Sukaringin. Penambahan Instalasi Pipa Air (IPA) di Sukaringin sampai saat ini masih dalam proses dan itu pun keterjangkauannya masih terbatas pada area perumahan cluster/kompleks. Perumahan cluster diprioritaskan PDAM Tirta Bhagasasi dikarenakan ada permintaan langsung dari pengembang untuk ketersediaan air bersih.

Wilayah Kampung Kedungringin sendiri meskipun termasuk ke wilayah Desa Sukaringin belum bisa mendapatkan akses terhadap air bersih karena Kampung Kedungringin termasuk kriteria area perumahan domestik, sehingga belum bisa mendapatkan air bersih dari PDAM Tirta Bhagasasi. Diperlukan pengajuan secara kolektif bisa melalui pemerintah desa kepada PDAM Tirta Bhagasasi. Namun, dukungan pemerintah desa setempat pun belum terlihat karena sejauh ini belum ada pengajuan dari Pemerintah Desa Sukaringin untuk mengalirkan air bersih dari PDAM ke Desa Sukaringin khususnya ke perumahan domestik. Hal ini sesuai dengan prosedur dari PDAM Bhagasasi bahwa air PDAM akan mengalir ke Kampung Kedungringin apabila ada permintaan dari pemerintah desa setempat. Hal ini dikarenakan Kampung Kedungringin bukan merupakan area perumahan cluster, jadi termasuk kriteria wilayah domestik sehingga permintaan air bersih ke PDAM Tirta Bhagasasi harus ada pengajuan terlebih dahulu dari pemerintah desa setempat secara kolektif. Namun sampai saat ini, kebutuhan air bersih untuk Kampung Kedungringin belum diajukan ke PDAM Tirta Bhagasasi. Inilah kemudian yang menjadi faktor lainnya ketersediaan air bersih di Kampung Kedungringin masih langka dan PDAM belum masuk ke wilayah Kedungringin.

Melihat sumber daya yang ada dan dana yang masuk di desa, maka seharusnya pemerintah desa dapat memaksimalkan sebagian dana desa untuk memberikan perhatian dalam mengelola sumber mata air yang ada karena pemerintah desa juga memiliki kewenangan yang otonom dalam mengelola dana desa tersebut. Oleh sebab itu pemerintah desa harus memperhatikan tuntutan dari masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk mengeluarkan anggaran yang begitu besar dan meminta sumbangan kepada donatur dalam memperoleh air bersih. Disamping itu masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan air bersih apabila pemerintah serius memperhatikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Desa Sukaringin. Karena dengan pemberian kewenangan kepada Desa dalam mengelola dana desa yang diberikan menjadi suatu aktivitas yang memerlukan perhatian lebih agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan oleh setiap penduduk desa.

Kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum adalah salah satu sebagai karakteristik negara termasuk dalam memberikan pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak semata meliputi adanya kebutuhan pangan, sandang dan papan saja. Akan tetapi Masyarakat dapat dikatakan sejahtera jika dapat hidup jauh lebih sehat dengan adanya sumber daya alam yang sudah tersedia dengan baik. Kebudayaan warga

menggunakan sumber daya alam yang ada untuk memberikan kebutuhan hidupnya demi keberlangsungan siklus hidup yang sudah ada. Salah satunya adalah terpenuhinya sumber daya yang sangat penting bagi makhluk hidup manusia dan makhluk hidup lainnya adalah air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Begitu pentingnya air, sehingga diperlukannya upaya serta peran dari pemerintah dalam mempertahankan dan mengelola sumber air dengan baik. Keberadaan sumber air bersih menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat.

Dengan demikian, politik kebijakan air bersih di Kabupaten Bekasi masih memprioritaskan perumahan cluster dibandingkan ke perumahan domestik. Adapun alasannya disebabkan oleh: 1) Jarak permukiman ke saluran pipa air bersih jauh. Pemukiman di Kampung Kedungingin sampai saat ini belum terjangkau air bersih. Hal ini disebabkan oleh pipa saluran air bersih yang berasal dari PDAM Tirta Bhagasasi lokasinya jauh dari Kampung Kedungingin, dan lokasi terdekat yang ada saluran pipa air bersihnya adalah Tambelang.; 2) Kemampuan untuk membayar layanan air bersih yang masih rendah. Masyarakat Kampung Kedungingin sebagian masih tergolong miskin. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mendapatkan layanan air bersih. Jangankan untuk mengadakan air bersih yang berasal dari PDAM, kemampuan untuk menggali sumur yang mereka miliki supaya lebih dalam sehingga bisa diperoleh air yang jernih pun tidak mampu. Hal ini kemudian yang menyebabkan air bersih belum bisa mengalir ke Kampung Kedungingin. Ditambah lagi PDAM Tirta Bhagasasi yang lebih memprioritaskan permukiman cluster/kompleks karena kemampuan mereka membayar layanan air bersih lebih tinggi, maka aksesibilitas air bersih ke perumahan domestik masih rendah. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Herrera bahwa konsumen kelas menengah memiliki lebih banyak keamanan finansial dan daya beli. Mereka lebih terlibat dan membuat tuntutan terorganisir pada pemerintah, Komunitas kelas menengahlah yang lebih mampu membayar sedikit lebih banyak uang dan mendapatkan layanan yang lebih baik (Herrera, 2017). Berdasarkan penjelasan diatas, maka politik pengelolaan air bersih di Kabupaten Bekasi belum adil, seharusnya kebijakan publik mengandung multi tujuan yakni untuk menjadikan kebijakan itu sebagai kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama (Rahmawati, 2017).

Persoalan krisis air bersih di berbagai belahan dunia belum mendapatkan perhatian yang besar karena fokus perhatian dunia tertuju pada masalah Kesehatan global yakni penyakit seperti malaria, TBC, dan AIDS, yang membunuh sebagian kecil dari jumlah orang yang meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan air. Kemauan politik yang diperlukan belum dikerahkan untuk mengatasi krisis air dan sanitasi, di antara tujuan pembangunan milenium PBB yang paling diabaikan. Analisis biaya manfaat baru-baru ini yang dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia membuat alasan kuat untuk investasi di sektor air bersih. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan kembali komitmennya untuk mengatasi kekhawatiran tentang air. Dukungan politik sangat mendesak diperlukan di semua tingkatan untuk pengembangan dan penerapan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan akses air yang aman, dan untuk meningkatkan pengawasan penyakit yang berhubungan dengan air (Barry, 2008).

SIMPULAN

Politik kebijakan air bersih di Kabupaten Bekasi masih memprioritaskan perumahan cluster dibandingkan ke perumahan domestik. Adapun alasannya disebabkan oleh: 1) Jarak permukiman ke saluran pipa air bersih jauh. Pemukiman di Kampung Kedungingin sampai saat ini belum terjangkau air bersih. Hal ini disebabkan oleh pipa saluran air bersih yang

Restu Rahmawati & Firman Firman:

Politik Air Bersih di Desa Sukaringin

berasal dari PDAM Tirta Bhagasasi lokasinya jauh dari Kampung Kedungringin, dan lokasi terdekat yang ada saluran pipa air bersihnya adalah Tambelang.; 2) Kemampuan untuk membayar layanan air bersih yang masih rendah. Masyarakat Kampung Kedungringin sebagian masih tergolong miskin. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mendapatkan layanan air bersih. Jangankan untuk mengadakan air bersih yang berasal dari PDAM, kemampuan untuk menggali sumur yang mereka miliki supaya lebih dalam sehingga bisa diperoleh air yang jernih pun tidak mampu. Hal ini kemudian yang menyebabkan air bersih belum bisa mengalir ke Kampung Kedungringin. Ditambah lagi PDAM Tirta Bhagasasi yang lebih memprioritaskan pemukiman cluster/kompleks karena kemampuan mereka membayar layanan air bersih lebih tinggi, maka aksesibilitas air bersih ke perumahan domestik masih rendah.

Adapun tantangan yang dihadapi PDAM Tirta Bhagasasi dalam menyediakan air bersih ke Kampung Kedungringin yakni terkait jarak Kedungringin jauh dengan Instalasi Pengolahan Air (IPA), minimnya modal yang dimiliki PDAM Tirta Bhagasasi karena dukungan dana selama ini banyak didukung pihak swasta daripada Pemerintah Daerah Bekasi, sumber air baku untuk pengolahan air PDAM Tirta Bhagasasi masih terbatas karena hanya mengandalkan Kalimalang. Dengan demikian, rendahnya aksesibilitas air bersih ke perumahan domestik di Kampung Kedungringin menunjukkan bahwa air bersih hanya dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mempunyai uang. Dengan demikian, diharapkan PDAM Tirta Bhagasasi lebih adil dan menjangkau semua lapisan masyarakat dalam menentukan kebijakan pengelolaan air bersih di Kabupaten Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnes, J. (2009). Managing the Waters of Bath Country: The Politics of Water Scarcity in Syria. *Geopolitics*, 14(3), 510–530. <https://doi.org/10.1080/14650040802694117>
- Barry, M., & Hughes, J. M. (2008). Talking Dirty — The Politics of Clean Water and Sanitation. *New England Journal of Medicine*, 359(8), 784–787. <https://doi.org/10.1056/nejmp0804650>
- Bekasi, B. (2020). *Jumlah Penduduk Kecamatan Sukawangi menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan*. . Bekasi: Badan Pusat Statistik.
- Endaryanta, E. (2007). *Politik Air di Indonesia: Penjarahan si Gedhang oleh Korporasi Aqua-Danone*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Herrera, V. (2017). *Water & Politics*. Mexico: UCONN.
- McCarl, B. A., & Reilly, J. M. (1999, August). Water and the agricultural climate change assessment: Issues from the standpoint of agricultural economists. In *Proceedings of American water resources association special conference on potential consequences of climate variability and change to water resources*.
- Mercer, K. L. (2018). The Politics in Water. *Journal - American Water Works Association*, 110(3), 2. <https://doi.org/10.1002/awwa.1026>
- Millington, N. (2018). Producing water scarcity in São Paulo, Brazil: The 2014–2015 water crisis and the binding politics of infrastructure. *Political Geography*, 65, 26–34. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.04.007>

- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif [Edisi Revisi]*. Jakarta: Remaja Rosdakarya E.
- Rahmawati, R., & Firman, F. (2017). Analisis Impelementasi Kebijakan Aplikasi Qlue Di Wilayah Jakarta Utara. *ARISTO*, 5(2), 386 - 404. doi: <https://doi.org/10.24269/ars.v5i2.542>
- Sihotang, J. (2018). *Penuhi Cakupan Air Bersih, PDAM Lakukan Kerjasama Pihak Ketiga* . Retrieved from tirtabhagasasi.co.id:: <https://tirtabhagasasi.co.id/penuhi-cakupan-air-bersih-pdam-lakukan-kerjasama-pihak-ketiga/>
- Stern, N. (2014). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Trust Fund for Human Security. (2009). *Human Security in Theory and Practice: An Overview of Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*. diakses pada 19 Januari 2017 http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/humansecurity_in_theory_and_practice_english.pdf
- United Nations Water. 2013. *Water Security & the Global Water Agenda: A UN-Water Analytical Brief*. diakses pada 16 Februari 2017 http://www.unwater.org/downloads/watersecurity_analyticalbrief.pdf